

Pendidikan di Daerah Terpencil: Masalah dan Penanganannya

Dedi SUPRIADI

SEMINAR dan lokakarya (Semlok) mengenai pendidikan dasar di daerah terpencil yang diselenggarakan di IKIP Bandung pada 31 Juli - 2 Agustus 1990 lalu berhasil mengungkap permasalahan pendidikan di daerah terpencil. Meskipun fokus yang disorot adalah propinsi Riau, pembahasan meluas ke propinsi-propinsi lain. Ini disebabkan oleh apa yang dialami di Riau pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan di propinsi-propinsi lain di Indonesia. Selain itu, para peserta juga datang dari berbagai propinsi di Indonesia, dan mereka umumnya adalah pengelola pendidikan dasar di daerahnya. Melalui forum itu, mereka menyetengahkan permasalahan pendidikan dasar di daerah terpencil di daerahnya dan berbagi pengalaman mengenai bagaimana permasalahan yang sulit itu ditangani.

Keterpencilan Fisik dan Kultural

Yang menarik, ada perbedaan pendapat mengenai pengertian daerah terpencil yang perlu diliput dalam seminar tiga hari itu. Ka-

langan antropolog dan sosiolog menghendaki agar yang dibicarakan bukan hanya keterpencilan secara fisik, melainkan juga keterpencilan secara kultural beserta implikasi pendidikannya. Selama ini memang, ada kecenderungan daerah terpencil hanya diartikan secara fisik, padahal keterpencilan secara kultural juga tak kalah rumit masalahnya.

Daerah terpencil secara fisik menunjuk pada daerah yang lokasinya jauh, sulit dijangkau karena sarana transportasi dan komunikasi yang kurang, dan kondisi alam geografisnya tidak menguntungkan. Daerah ini meliputi: (a) daerah terpencil daratan pedalaman; (b) daerah terpencil pantai dan aliran sungai; dan (c) daerah terpencil perairan, kepulauan, dan pembatasan internasional.

Di pihak lain, suatu kelompok masyarakat disebut terpencil secara kultural adalah apabila kontak dengan "dunia" luar dan kemauannya untuk menyerap unsur-unsur budaya luar sangat rendah. Bisa juga akses mereka memang kurang untuk bergaul dengan lingkungan budaya di luar kelompok-

nya karena peluang untuk itu terbatas. Akibatnya, proses perubahan sosial dalam masyarakatnya sangat lamban. Dalam banyak kasus, keterpencilan kultural ini disebabkan oleh keterpencilan secara fisik.

Keterpencilan kultural suatu masyarakat yang daerahnya relatif terbuka adalah lebih banyak disebabkan oleh keengganan masyarakat itu untuk membuka dirinya dan menyerap budaya luar (hambatan *internal*) atau karena kurangnya peluang yang diberikan kepada mereka untuk turut berkiprah dalam masyarakat (hambatan *eksternal-struktural*). Contoh yang pertama adalah suku Sakai di Riau dan Baduy di Jawa Barat; contoh yang kedua adalah kelompok masyarakat "pinggiran" yang tinggal di pemukiman kumuh di kota.

Di tengah belantara metropolitan Jakarta sekalipun, masih banyak masyarakat yang tergolong terpencil secara kultural. Anak-anak mereka sering disebut *disadvantaged children*, yang dari segi kualitas dan kompleksitas tak kalah rumit persoalannya dibanding anak-anak di daerah terpencil secara fisik. Toh Semlok di Bandung memilih keterpencilan fisik sebagai fokus bahasannya.

Karakteristik Daerah Terpencil

Dibandingkan dengan daerah yang (relatif) tidak terpencil, maka daerah terpencil tampil dengan karakteristik geografis, sosio-kultural, dan pendidikan yang khas, sehingga membutuhkan pendekatan tersendiri dalam penanganan pendidikannya. Se jauh terungkap dalam Semlok itu, profil daerah terpencil dan masyarakatnya adalah sebagai berikut.

Baik di daerah pedalaman, aliran sungai, maupun kepulauan, jarak antara pemukiman-pemukiman penduduk satu sama lain berjauhan, sementara setiap kantong pemukiman hanya dihuni oleh 5-10 KK. Kontak antara mereka sulit, karena sarana transportasi dan komunikasi kurang.

Secara ekonomis mereka umumnya miskin. Dalam kehidupan, mereka masih mengidap mentalitas *subsistensi*, dalam pengertian bekerja hanya untuk hari ini dan kini dengan prinsip "pokoknya bisa bertahan hidup," bagaimanapun kondisi kehidupannya. Mereka hidup sebagai petani atau nelayan. Mereka mengkonsumsi sendiri hasil pertanian dan perikanan, dan belum memperlukukannya sebagai komoditas yang bisa diuangkan. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan mereka mengenai usaha yang masih lemah, sikap hidup yang fatalistik, kemampuan bernegosiasi kurang, dan di atas semuanya karena hubungan dengan dunia luar amat sulit akibat miskinnya sarana transportasi.

Dari segi pendidikan, mereka umumnya berpendidikan rendah, bahkan banyak orang dewasa yang masih buta aksara. Program Kejar Paket A belum menyentuh orang dewasa di lokasi-lokasi terpencil itu, dan persoalannya sama dengan untuk tingkat sekolah dasar. Anak usia sekolah banyak yang belum terjangkau pendidikan karena lokasi tinggalnya yang jauh dari sekolah.

Apresiasi dan aspirasi orang tua terhadap pendidikan anaknya juga rendah. Mereka kurang menilai pendidikan bagi anaknya penting, karena tidak (belum?) melihat nilai fungsional dari pendidikan bagi kehidupan langsung mereka yang sangat berorientasi pada hari ini. Kepercayaan yang dikembangkan orang tua pada anaknya mengenai pen-

didikan ialah, "Bapak dan Ibu tanpa sekolah pun tetap bisa hidup, jadi buat apa kamu sekolah." Arti pendidikan/belajar (dalam arti belajar akademik, *schooling*) ditakar dari kegunaannya secara langsung bagi kehidupan.

Di kalangan anak-anak yang telah terjangkau oleh sekolah, tingkat putus sekolah sangat tinggi. Di kawasan pulau terpencil lautan, mereka berhenti sekolah umumnya pada kelas III atau IV, atau jika mereka merasa telah memperoleh sesuatu yang berguna bagi kehidupannya dalam lingkungan masyarakatnya. Misalnya mereka telah mengenal huruf dan angka (membaca, menulis, dan berhitung). Ada keyakinan pada mereka, semakin lama mereka tinggal di sekolah, semakin kurang waktu mereka untuk membantu orang tuanya mencari nafkah, juga semakin terlambat mereka bisa belajar mengemudikan perahu. Dalam hal terakhir ini, ada kepercayaan bahwa untuk bisa mengemudikan perahu guna menangkap ikan, ada "masa peka" yang tidak boleh dilalui, yakni sekitar usia 9-10 tahun yang sama dengan kelas III dan IV SD. Lewat dari kelas ini, kelenturan dan keseimbangan tubuh mereka kurang peka lagi dalam mengemudikan perahu di laut lepas.

Di daerah kepulauan, secara tradisional penduduk sangat akrab dengan kehidupan laut dan mereka menggantungkan kehidupannya pada laut. Sedemikian kuat keakraban tradisional yang telah mereka hayati turun-temurun itu, sehingga mereka cenderung resisten terhadap perubahan. Mereka sulit mengembangkan *keakraban baru* yang lebih maju dengan laut. Contoh kasus di Riau, anak-anak yang dilatih oleh nelayan Thailand untuk melaut dan menangkap ikan, kebanyakan putus di tengah jalan, antara lain karena mereka merasa cara-cara

(baru) yang dikembangkan para nelayan Thailand itu terasa asing bagi mereka.

Jumlah anak-anak usia sekolah tersebar di lokasi-lokasi yang berjauhan dalam jumlah kecil, kadang-kadang hanya 5-10 orang. Akibat dari kondisi ini, rasio kelas : murid sangat rendah. Di pihak lain, rasio guru : murid beragam, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Misalnya, di suatu SD jumlah murid seluruhnya hanya 60 orang untuk kelas I sampai VI dan diasuh oleh 2 orang guru. Dari segi rasio guru : kelas, SD ini jelas sangat kekurangan guru, tetapi dari rasio guru : murid (yakni 1 : 10) angka ini lebih dari ideal. Jadi persoalannya adalah penyebaran anak usia sekolah.

Di daerah kepulauan, kehadiran anak ke sekolah sangat tergantung kepada musim. Jika musim panen ikan, anak-anak jarang datang ke sekolah karena mengikuti orang tuanya melaut. Jika musim panen ikan lewat, anak-anak datang lagi ke sekolah. Selain itu, lokasi tempat tinggal anak dengan sekolah berjauhan. Secara efektif, sekolah hanya berjalan sekitar 3 bulan dalam satu tahun.

Masalah lain ialah kesulitan komunikasi yang mengakibatkan kontak guru dengan "dunia luar" sangat terbatas. Guru mengajar menurut apa yang dapat mereka lakukan. Penyelesaian target kurikulum tidak begitu mereka persoalkan, karena yang penting adalah bagaimana mereka bisa melayani semua anak dalam pengetahuan yang esensial. Satu guru melayani tiga kelas sekaligus merupakan hal yang luar biasa. Akibat lain dari keterpencilan ialah pembaruan pendidikan sulit menepai mereka. Misalnya, seorang guru baru menerima petunjuk tentang adanya pembaruan pada saat pembaruan lain (yang lebih baru) telah diperkenalkan di

lokasi tak terpencil. Dalam informasi, mereka ketinggalan sekian langkah dari guru-guru yang bertugas di daerah tidak terpencil.

Keterpencilan membuat para guru tidak betah di tempatnya. Akibatnya mereka banyak yang mudah sekali minta pindah ke lokasi tidak terpencil, meskipun telah ada aturan (di Riau misalnya) bahwa mereka boleh mengajukan permohonan itu setelah bertugas minimal 4 tahun di lapangan. Tetapi hal ini membuat masa tugas mereka di lapangan adalah ibarat menanti saat pindah pada suatu ketika ke lokasi tak terpencil. Bisa diduga bahwa sebagian guru menjalani masa 4 tahun itu dengan setengah hati, dan ibarat hanya untuk "menghabiskan masa tahanan" di daerah terpencil.

Implikasi Pendidikan

Kondisi-kondisi di atas membawa implikasi pada pendekatan, format, sistem, dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan yang mestinya disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal. Banyak pemikiran yang muncul dalam hal ini, seperti diangkat berikut ini:

1. Dari segi isi, materi pendidikan yang diberikan seyogyanya lebih memberikan tekanan pada pengetahuan yang fungsional bagi kehidupan anak, yaitu menulis, membaca, dan berhitung, tanpa mengabaikan mata ajaran lain, khususnya PMP dan IPS. Guru seyogyanya diberikan kebebasan untuk memodifikasi isi kurikulum nasional bagi kepentingan yang sesuai dengan kondisi setempat;
2. Muatan lokal dalam kurikulum seyogyanya terdiri atas keterampilan-keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lingkungan anak. Di daerah kepulauan misalnya keterampilan menangkap ikan, membuat jaring, atau mengasah tombak perlu diberikan. Orientasi kelautan yang lebih maju perlu mengisi muatan lokal. Porsi muatan lokal ini seyogyanya seimbang dengan porsi materi akademik (3 R's) dalam kurikulum. Untuk itu, guru yang ditugaskan di daerah terpencil (kepulauan khususnya) perlu dibekali keterampilan yang relevan dengan kebutuhan penduduk setempat;
3. Penyelenggaraan pendidikan seyogyanya terpadu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara umum. Ini berarti bahwa pendidikan diperlakukan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk. Dalam pelaksanaan, rekomendasi 1 dan 2 di atas perlu dikoordinasikan dengan Departemen Sosial yang juga menugaskan pekerja sosial ke lokasi-lokasi terpencil tersebut untuk menjadi agen-agen pembaruan;
4. Secara kelembagaan, pendidikan yang dikembangkan hendaknya tidak secara kaku terikat oleh batasan-batasan konvensional mengenai pendidikan formal (sekolah), melainkan harus bersifat luwes. Dari segi isi, ia mengandung unsur-unsur pendidikan formal, tetapi praktiknya dapat berupa pendidikan non-formal. Dengan kata lain, *kacamata Jakarta* perlu banyak mengalami penyesuaian untuk daerah-daerah terpencil;
5. Guru seyogyanya peka dalam memperkenalkan nilai-nilai baru agar murid-murid tidak mengalami kejutan, khususnya yang menyangkut kepercayaan dan tradisi kehidupan mereka. Meskipun pada akhirnya mereka harus dibawa ke suatu tata nilai yang dikehendaki (jadi, normatif) sesuai dengan yang disepakati secara nasional, mereka harus diajak se-

cara setahap demi setahap ke perangkat nilai-nilai dan cara hidup baru tanpa mereka harus merasa dicabut secara paksa dari budaya asalnya. Ini juga yang secara khusus dipesankan oleh Mendagri Rudini ketika membuka secara resmi Semlok ini. Dalam belajar, potensi belajar asli (*indigenous learning*) mereka perlu dikembangkan. Sebab bagaimanapun sederhananya suatu masyarakat, mereka tetap mempunyai tradisi belajar. Potensi inilah justru yang sering kita abaikan, sambil berpretensi bahwa kita berpijak pada cara pandang "modern" dalam pendidikan;

6. Pernikahan "campuran" antara guru dengan penduduk setempat dapat dipertimbangkan sebagai alternatif agar membuat guru betah tinggal di pulau-pulau terpencil. Sejalan dengan ini, perlu disiapkan suatu pola untuk merekrut guru-guru dari penduduk terpencil itu, melalui sistem semacam *talent scouting*. Mereka diberi beasiswa oleh Pemda, disekolahkan sampai SLTA atau D2 pada PGSD di LPTK untuk SD, dan dikirimkan kembali ke daerah asalnya. Juga, seperti sering disarankan, insentif finansial dan kenaikan pangkat istimewa seyogyanya diberikan kepada para guru di daerah terpencil.

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Ada lima alternatif sistem penyelenggaraan pendidikan dasar untuk daerah terpencil yang direkomendasikan dari seminar itu.

Pertama, sistem *asrama* yang mirip pondok pesantren. Anak-anak usia sekolah dias-

ramakan dan biayanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Masa mereka tinggal di asrama tidak perlu sepanjang tahun, melainkan dapat beberapa bulan dalam setahun asalkan belajar diintensifkan. Ketika musim panen (tanaman, ikan) tiba, mereka "dilepas" kembali kepada orang tuanya untuk membantu mencari nafkah. Setelah musim panen, anak-anak itu dijemput kembali untuk diasramakan. Begitulah, sekolah mengikuti irama kehidupan mereka.

Kedua, *guru kunjung*. Caranya ialah guru secara teratur berkunjung ke lokasi terpencil untuk mengajar anak-anak di sana (misalnya seminggu sekali dan menetap sementara di sana). Tempatnya tak perlu berupa ruangan kelas seperti pada SD kecil, melainkan bisa di rumah penduduk atau balai pertemuan penduduk. Alternatif ini bisa dikombinasikan dengan sistem *kelas jauh* yang paralel dengan SD induknya, sebagai alternatif ketiga.

Alternatif keempat adalah *SD Kecil* seperti dewasa ini telah banyak diterapkan. Pengadaan guru untuk SD ini jangan hanya diperhitungkan berdasarkan rasio guru : murid, melainkan rasio guru : kelas dan berdasarkan kebutuhan untuk tiap lokasi yang ada SD Kecilnya.

Khusus untuk daerah kepulauan, alternatif lain adalah *sekolah terapung*. Model ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang hidupnya berpindah-pindah (misalnya Suku Laut di Riau). Sekolah mengikuti mereka, dan bukan mereka yang mengikuti sekolah. Meskipun mahal, model ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif.